

ABSTRAK

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah yang bertujuan mengatasi persoalan publik. Dalam administrasi kependudukan, hal ini menjadi sangat menentukan karena menyentuh langsung hak dasar warga negara melalui E-KTP sebuah dokumen identitas tunggal yang menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai layanan penting. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Estimasi waktu dan Biaya tarif dan Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Elektronik (E-KTP) Penduduk Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Disposisi (sikap pelaksana) dan Sumber daya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi sangat bertentangan dengan kebijakan resmi. Waktu penyelesaian yang tidak pasti hingga berbulan-bulan, sementara modus ‘uang administrasi’ dan ‘jalur cepat’ menciptakan sistem bayangan yang diskriminatif berbasis kemampuan ekonomi. Kegagalan ini berakar pada keterbatasan sumber daya dimana sarana usang dan jaringan tidak stabil akibat minimnya prioritas anggaran kabupaten yang menjadi kendala utama. Keterbatasan ini lalu menciptakan kondisi kerja menekan yang secara langsung membentuk disposisi pelaksana yakni sikap apatis muncul sebagai mekanisme bertahan, sementara perilaku koruptif tumbuh akibat lemahnya pengawasan dan ketiadaan sistem motivasi. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Simalungun memprioritaskan alokasi anggaran untuk peremajaan infrastruktur teknologi serta memperkuat sistem pengawasan internal untuk memulihkan integritas layanan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pelayanan, Perekaman dan Percetakan, E-KTP*

ABSTRACT

The implementation of public policy is the process of carrying out government decisions aimed at addressing public issues. In population administration, this plays a crucial role as it directly touches upon the fundamental rights of citizens through the Electronic Identity Card (E-KTP), a single identification document that serves as a prerequisite for accessing various essential services. This study aims to examine how the implementation of the recording and printing policy of the Electronic Identity Card (E-KTP) at the Tanah Jawa District Office, Simalungun Regency, is carried out, with a focus on time estimation and cost tariffs. It also seeks to identify the inhibiting factors in the implementation of the recording and printing policy of the Electronic Identity Card (E-KTP) in Tanah Jawa District, Simalungun Regency, focusing on disposition (attitude of implementers) and resources. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The results show that the implementation is highly inconsistent with the official policy. Processing times are uncertain, often taking months, while practices such as “administrative fees” and “fast-track services” have created a shadow system that is discriminatory and based on economic capability. This failure stems from limited resources, where outdated equipment and unstable networks—resulting from the lack of budget prioritization by the regency—serve as the main obstacles. These limitations then create a stressful working environment that directly shapes the disposition of implementers, with apathy emerging as a survival mechanism, while corrupt practices grow due to weak supervision and the absence of an effective motivation system. Therefore, it is recommended that the Simalungun Regency Government prioritize budget allocation for the renewal of technological infrastructure and strengthen internal supervision systems in order to restore service integrity.

Keywords: Policy Implementation, Services, Recording and Printing, E-KTP